

B. 14.

**ANALISIS KEBUTUHAN PEKERJA SOSIAL DI KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**Drs. Edi Suhandi, M.Si
Dr. Bambang Rustanto, M.Hum
Nurhayani Lubis, SH.,M.Pd**



**PUSAT PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, laporan akhir penelitian dapat kami selesaikan.

Penelitian yang berjudul Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial di Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari penelitian yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kami tim peneliti terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Unit Kajian Perempuan STKS Bandung, dengan segala keterbatasan alhamdulillah dapat menyelesaikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Kesempatan penelitian yang kami peroleh, merupakan tugas kelembagaan dari Pusat Penelitian STKS Bandung melalui Unit Kajian Perempuan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ketua STKS Bandung, Kepala Pusat Penelitian, dan Ketua Unit Kajian Perempuan yang telah memberi kesempatan penelitian kepada kami.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang beserta jajarannya, dan pengurus yayasan/orsos yang telah menerima dengan baik kunjungan kami dalam rangka pengumpulan data.

Akhir kata, kami tim peneliti berharap, walaupun banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, semoga masih ada guna dan manfaatnya.

Bandung, Desember 2015

Tim Peneliti Unit Kajian Perempuan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN LITERATUR	
A. Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial	8
B. Bidang-bidang Pelayanan Sosial	21
C. Strategi Pelayanan Sosial	29
D. Organisasi (Badan) Pelayanan Sosial	30
E. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	33
F. Hakikat Analisis Kebutuhan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	50
B. Sumber Data	50
C. Populasi dan Sampling	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	51
F. Jadwal Penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Data Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Abstrak

**Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial di Kabupaten Sumedang. Edi Suhandi;
Bambang Rustanto; dan Nurhayani Lubis. Unit Kajian Perempuan Sekolah
Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang *setting* pelayanan sosial yang ada dan seharusnya ada, profil dan kebutuhan akan pekerja sosial di lembaga pelayanan sosial, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, data diperoleh dengan teknik wawancara terhadap 4 (empat) sampel lembaga pelayanan sosial yang ditentukan secara purposif. Selain itu data juga diperoleh dari kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang dan sumber lain dengan menggunakan teknik studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh yayasan swasta dilandasi oleh filosofi keagamaan dan kedermawanan dengan jenis layanan berupa pengasuhan dan pendidikan formal. Diperoleh data bahwa dibutuhkan jenis layanan berupa bimbingan dan konseling, pembinaan bakat, dan pembinaan spiritual. Belum ada Pekerja Sosial di *setting* anak yang menjadi sampel penelitian, namun demikian keberadaan Pekerja Sosial dirasa dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi klien di lembaga pelayanan sosial. Dalam menangani masalah sosial di Kabupaten Sumedang Pemerintah setempat memiliki kebijakan jangka panjang, yakni meningkatkan ketahanan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan kebijakan jangka pendek, yakni mengakses program-program penangan PMKS tingkat nasional di kementerian dan lembaga.

Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendorong profesionalisasi pelayanan sosial khususnya pada *setting* anak terlantar dengan cara penempatan Pekerja Sosial. Jumlah dan kualifikasi pekerja sosial yang dibutuhkan harus ditetapkan berdasarkan hasil kajian mendalam melalui studi ilmiah.

sistem sumber institusional, biasanya berupa panti, berada dalam koridor pelayanan berbasis institusi. Berbagai permasalahan dengan karakteristiknya sendiri membutuhkan sistem pelayanan yang berbeda. Apapun atau bagaimanapun sistem pelayanan yang dilakukan, baik yang berbasis masyarakat maupun yang berbasis institusi, terkait erat dengan sistem kebijakan, anggaran, profesionalisme pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah, peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial, serta kompleksitas masalah sosial yang dihadapi.

Lembaga kesejahteraan sosial merupakan salah satu sub sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Lembaga ini bertujuan agar penerima pelayanan kesejahteraan sosial atau penerima manfaat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka diperlukan berbagai sub sistem seperti yang dikemukakan di atas.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ujung tombak dalam sistem pelayanan langsung kepada penerima manfaat. SDM yang menjadi penentu pelaksanaan pelayanan adalah SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, serta komitmen untuk melakukan pelayanan sosial secara profesional. Pekerja Sosial merupakan SDM utama yang dikembangkan untuk memberikan pelayanan secara profesional dalam pelayanan sosial, baik pelayanan sosial yang berbasis masyarakat maupun yang berbasis institusi. Untuk menjalankan fungsi dan tugas sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara penuh, diperlukan SDM Pekerja Sosial sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia pada dasarnya diarahkan pada empat (4) dimensi penting, pertama peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial. Kedua, perluasan jangkauan

pelayanan yang makin adil dan merata. Ketiga, peningkatan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Keempat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial. Bila keempat dimensi ini terselenggara dengan baik, maka masyarakat yang telah berfungsi sosial secara normal akan lebih memberikan kontribusinya kepada pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan masyarakat yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akan terjangkau, tertolong untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial penyandang masalah dengan baik.

Desentralisasi kewenangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial merupakan suatu masalah besar yang muncul akibat proses penempatan kewenangan daerah dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Proses desentralisasi pembangunan kesejahteraan sosial mengakibatkan banyaknya Pekerja Sosial yang kurang dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Banyak Pekerja Sosial menjadi kurang berfungsi karena dialihkan menjadi pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang kurang relevan dengan profesinya.

Disamping itu, penerapan aturan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, mengakibatkan keberadaan Pekerja Sosial di lapangan semakin tidak jelas kiprahnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh sistem politik daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Desentralisasi mengakibatkan kurang diprioritaskannya sektor pembangunan yang tidak mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kemensos RI, saat ini Kementerian Sosial memiliki panti sebanyak 30 buah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dan 4 buah balai. Sesuai dengan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendekatan desentralistik (*bottom-up*) untuk masa yang akan datang, Kementerian Sosial harus menerapkan pendekatan desentralistik yang bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, sumber-sumber dan potensi serta kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan perlu membangun suatu jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan suatu pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan, sumber dan potensi masyarakat lokal.

Berdasarkan rasio perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Pekerja Sosial tahun 2013 masih sangat besar mengingat estimasi jumlah PMKS tahun 2013 sekitar 15,5 juta orang sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang ada baru sekitar 15.522 orang. Jika rasio idealnya 1:100, maka masih dibutuhkan 139.000 orang Pekerja Sosial lagi. Pemahaman di atas hanya melihat jumlah Pekerja Sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS saja, belum dilihat kualitas Pekerja Sosial itu sendiri serta kompleksitas masalah yang dihadapi PMKS

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan analisis kebutuhan Pekerja Sosial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada. Istilah analisis kebutuhan memiliki makna yang kurang lebih sama dengan asesmen kebutuhan, karena analisis kebutuhan dalam hal ini merupakan aktivitas untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau nilai yang diperlukan oleh Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan asesmen kebutuhan, Mc Killip (1987) menjelaskan: "*Need*" refers to the gap or discrepancy between a present state (what is) and a desired state (what should be). The need is neither the present nor the future state; it is the gap between them, yang kemudian di jelaskan lebih lanjut mengenai *need assessment* "...it means a plan for gathering information about discrepancies and for using that information to make decisions about priorities". Pandangan tersebut menjelaskan bahwa analisis kebutuhan

merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mengumpulkan data mengenai kesenjangan yang ada antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Analisis kebutuhan ini berguna untuk mengambil keputusan dalam penetapan prioritas.

Dikaitkan dengan kebutuhan Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial, baik di luar panti maupun di dalam panti, atau berbasis masyarakat serta berbasis institusi, maka asesmen kebutuhan akan Pekerja Sosial adalah suatu proses yang direncanakan untuk mengumpulkan data mengenai kesenjangan yang ada mengenai ketersediaan SDM Pekerja Sosial, antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sesuai dengan kompleksitas masalah maupun kuantitas masalah. Analisis kebutuhan tentang Pekerja Sosial ini berguna untuk mengambil keputusan dalam penetapan prioritas. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan analisis kebutuhan Pekerja Sosial.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan Penelitian Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial adalah untuk menjawab “Bagaimana kebutuhan Pekerja Sosial di Provinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kesejahteraan sosial” dengan sub-sub permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana setting pelayanan sosial yang ada, baik berbasis masyarakat maupun institusional ?
2. Bagaimana setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik berbasis masyarakat maupun institusional?
3. Bagaimana profil Pekerja Sosial yang ada dan ketercukupannya pada tiap setting pelayanan?
4. Bagaimana kebutuhan akan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional?

5. Bagaimana hambatan dalam perekrutan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perekrutan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional?
7. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani PMKS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebutuhan akan pekerja sosial di Provinsi Jawa Barat, yang diurai menjadi beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana setting pelayanan sosial yang ada, baik berbasis masyarakat maupun institusional
2. Mendeskripsikan bagaimana setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik berbasis masyarakat maupun institusional
3. Mendeskripsikan bagaimana profil Pekerja Sosial yang ada dan ketercukupannya pada tiap setting pelayanan
4. Mendeskripsikan bagaimana kebutuhan akan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional
5. Mendeskripsikan bagaimana hambatan dalam perekrutan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional
6. Mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perekrutan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional
7. Mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani PMKS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mendeskripsikan pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya diselenggarakan sesuai perkembangan permasalahan sosial yang ada, serta bermanfaat sebagai landasan empirik dalam penetapan prioritas kebutuhan akan Pekerja Sosial di Provinsi Jawa Barat. Secara rinci manfaat ini dapat diurai sebagai berikut:

1. Memberikan analisis mengenai proyeksi permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk memberikan taksiran: (proyeksi) kebutuhan akan Pekerja Sosial di Provinsi Jawa Barat yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan
3. Menjadi landasan empirik dalam merancang tindakan bagi pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengacu pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai suatu upaya maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang handal, terampil dan bertanggung jawab. SDM yang dimaksud adalah SDM yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, makna pekerjaan sosial bukan hanya kegiatan amal, kegiatan kemanusiaan atau kedermwanaan (*charity/filantropy*) sebagaimana yang muncul pada tahap-tahap awal perkembangannya, tetapi pekerjaan sosial diartikulasikan sebagai profesi atau keahlian di bidang pertolongan kemanusiaan yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka nilai (*body of value*) dan kerangka keterampilan (*body of skill*) yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktek profesional. Ketiga perangkat tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya. Secara konvensional, tugas utama Pekerja Sosial adalah

melaksanakan pelayanan kemanusiaan baik pada setting lembaga (seperti lembaga pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, lembaga perlindungan anak, panti sosial bagi manusia lanjut usia, dsb), maupun masyarakat, misalnya menjadi pengembang masyarakat/*community developer* yang menyelenggarakan program pemberdayaan komunitas lokal.

Pekerja Sosial berbeda dengan profesi lain, saat menghadapi klien, seorang Pekerja Sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk didalamnya "orang-orang penting lain" (*significant others*) yang mempengaruhi klien. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.

"*Social functioning to be a central purpose of social work and intervention was seen as the enhancement of social functioning*" demikian Skidmore, Thackeray and Farley (1999) dalam Suharto (2010). Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan orang, baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial sesuai tugas-tugas kehidupannya. Keluarga, organisasi sosial, dan komunitas juga dikatakan dapat berfungsi sosial, bila mereka mampu menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma-norma lingkungan sosialnya.

Edi Suharto (2006) menyatakan bahwa sebagai sebuah profesi kemanusiaan, secara garis besar ada empat (4) tugas profesi pekerjaan sosial, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Dalam menjalankan tugas ini Pekerja Sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam menjalankan tugas-

tugas kehidupan dan menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.

- b. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Beberapa tugas Pekerja Sosial yang terkait dengan peran ini antara lain: a) membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukannya; b) mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien; c) meningkatkan komunikasi diantara para petugas kemanusiaan; dan d) mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
- c. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan efektif dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
- d. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Menjalankan tugas ini, Pekerja Sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian Pekerja Sosial membuat naskah kebijakan (*policy paper*) yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini, Pekerja Sosial juga bisa menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mercapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999). Artinya seorang Pekerja Sosial profesional akan mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, kelompok, maupun masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya. Untuk itu menurut Skidmore dan

Thackeray (1982), aktivitas profesional Pekerja Sosial harus dilandasi oleh berbagai komponen profesi seperti berikut:

- a. Pekerjaan sosial sama seperti yang lainnya mempunyai fungsi memecahkan masalah (*problem solving function*)
- b. Praktek pekerjaan sosial merupakan suatu seni yang dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, nilai, dan keterampilan.
- c. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang muncul dan terus berkembang, karena mampu memenuhi kebutuhan orang dan aspirasinya diakui masyarakat.
- d. Pelaksanaan praktek pekerjaan sosial harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat dimana praktek tersebut dilaksanakan.
- e. Pengetahuan yang diperlukan untuk praktek pekerjaan sosial ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
- f. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para pekerja sosial profesional.
- g. Keterampilan profesi pekerjaan sosial diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Pelaksanaan praktek pekerjaan sosial selalu melibatkan pekerja sosial dalam level mikro, mezzo maupun makro. Mengacu pada pendapat Midgley (1995), Gray (1997), dan Cox (2001) dalam Adi (2007), bahwa dalam melaksanakan pembangunan sosial ada tiga (3) level/tataran yang memerlukan keterlibatan Pekerja Sosial, yaitu:

- a. Level mikro. Pada tataran ini, pendekatan pekerjaan sosial merujuk pada berbagai keahlian untuk mengatasi masalah individual. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan trauma psikologis, seperti: konseling trauma dari tindak kekerasan, masalah penyesuaian diri, apatisme hingga gangguan mental. Pendekatan mikro lebih bersifat rehabilitatif dan remedial (penyembuhan).

- b. Level mezzo. Pada level ini titik berat adalah pada upaya komunitas yang bekerja sama guna menghadapi permasalahan yang ada di tingkat komunitas. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui intervensi komunitas dengan mengembangkan program yang bersifat preventif, proaktif, dan kreatif pada berbagai jenis organisasi layanan masyarakat, seperti: pengembangan masyarakat, perencanaan komunitas, pendidikan masyarakat, dan sebagainya.
- c. Level makro. Pada level ini pendekatan yang digunakan lebih kepada level normatif dimana praktisi kesejahteraan sosial dalam arti luas terlibat dalam berbagai upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial, bagaimana seorang pakar kesejahteraan sosial berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di level yang lebih makro dari komunitas lokal sehingga warna proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang lebih memperhatikan unsur partisipasi publik, desentralistik, dan demokratis.

Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan bahwa: "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu". Dalam kaitannya dengan profesi pekerjaan sosial, maka standar kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Pengetahuan Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan sosial harus mempergunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji validitasnya. Menurut Morales and Sheafor (1983), pengetahuan

didefinisikan sebagai “*Knowledge may be generally defined as the acquaintance with or theoretical or practical understanding of some branch of science, art, learning or other are involving study, research or practical and the acquisition of skills*”. Pengetahuan pada umumnya dihasilkan dari riset dan praktek yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya.

Secara garis besar pengetahuan pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial, yaitu: Pertama, pengetahuan tentang klien, baik klien sebagai individu, kelompok maupun masyarakat; Kedua, pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*), dan ketiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial professional, yang meliputi pengetahuan tentang: diri sebagai seorang pekerja sosial (*self*), profesi (*profession*), dan intervensi (*intervention*).

Hepworth dan Larsen (1982), memberikan empat (4) kelompok pengetahuan pekerjaan sosial :

Pertama, Tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial (*Human Behavior in the Social Environment*). Kelompok pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang: a) Pertumbuhan dan perkembangan manusia, b) Permasalahan yang dialami manusia, c) Sumber-sumber dan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap tahap perkembangan, d) interaksi antara individu dengan lingkungannya, e) kekuatan dan motivasi manusia, f) faktor-faktor yang perlu dikembangkan, dan g) perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.

Kedua, Kebijakan Sosial (*Social Policy*), meliputi pengetahuan tentang: a) Perumusan kebijakan sosial yang berkaitan sistem pelayanan, baik dari pemerintah maupun swasta, b) Misi dan etika profesi dalam hal kebijakan sosial, c) Partisipasi pekerja sosial dalam memanfaatkan dan mengembangkan kebijakan sosial guna meningkatkan fungsionalitas

individu, kelompok dan masyarakat, d) Komitmen pekerjaan sosial terhadap keadilan sosial, e) Permasalahan kesejahteraan sosial, dan f) Ketimpangan distribusi/akses/kesempatan, sumber, barang, pelayanan yang diperoleh kelompok minoritas, atau kelompok yang kurang beruntung.

Ketiga, Metode-metode pekerjaan sosial (*Social Work Methods*). Pekerja Sosial di dalam melaksanakan misi dan tujuan profesinya, perlu memiliki pengetahuan tentang metode-metode pekerjaan sosial yang meliputi: a) Cara-cara untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya, b) Proses pemecahan masalah, c) Peranan-peranan yang dilaksanakan Pekerja Sosial dalam proses pemecahan masalah, dan f) interview, negosiasi, dan interaksi.

Keempat, Penelitian (*Research*). Penelitian di dalam kerangka pengetahuan pekerjaan sosial semakin lama dirasakan semakin penting. Hasil penelitian ilmiah akan merupakan kekuatan bagi perkembangan pengetahuan profesi tersebut

3. Nilai-nilai Pekerjaan Sosial

Nilai mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam praktek pekerjaan sosial. Pincus dan Minahan (1973) menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pekerja Sosial di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi Pekerja Sosial (*personal values*), nilai-nilai profesi pekerjaan sosial (*profession values*), dan nilai klien atau kelompok klien (*the values of a client or client group*).

Sumber-sumber nilai pekerjaan sosial pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) elemen nilai yaitu:

Pertama, Nilai masyarakat (*Societal values*). Pengetahuan pekerjaan sosial dapat diperoleh darimana saja, tetapi Pekerja Sosial perlu menyaringnya untuk disesuaikan dengan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Apa yang dipraktekkan dalam masyarakat belum tentu merupakan kegiatan untuk melaksanakan nilai, sebaliknya nilai belum tentu merupakan hal yang dipraktekkan di dalam masyarakat. Jadi nilai masyarakat bisa menjadi sumber nilai bagi para praktisi kesejahteraan sosial

Kedua, Kode etik (*Code of ethic*). Kode etik merupakan rumusan tentang perilaku yang dianggap baik dan perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar para anggotanya tidak melakukan malpraktek. Tujuan dan fungsi kode etik adalah: a) melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria-kriteria yang dapat diikuti untuk mengatur tingkah laku anggotanya; b) secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab bagi para anggota di dalam melaksanakan praktek; dan c) melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten. Kode Etik pekerjaan sosial pada prinsipnya mengatur empat (4) hal, yaitu: Perilaku dan sifat-sifat utama sebagai Pekerja Sosial, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap sejawat, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap Badan sosial yang mempekerjakan, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap profesi, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap masyarakat, Tujuan lembaga dimana Pekerja Sosial bekerja (*Agency Purpose*). Pekerja Sosial harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam lembaga Pekerja Sosial tersebut bekerja.

Ketiga, Teori (*Theory*). Teori dianggap baik jika dapat berfungsi sebagai nilai. Teori-teori pekerjaan sosial juga mengandung unsur-unsur nilai yang dapat dijadikan sumber bagi pembentukan kerangka nilai pekerjaan sosial. Nilai-nilai teori pekerjaan sosial dikelompokkan

menjadi: a) nilai tentang konsepsi orang; b) nilai tentang masyarakat; dan c) nilai yang berkaitan dengan interaksi orang.

4. Keterampilan Pekerjaan Sosial

Kompetensi pekerjaan sosial tidak hanya diperoleh melalui pemahaman tentang berbagai teori atau ilmu kesejahteraan sosial, tetapi juga terkait dengan unsur praktek. Bagaimana seorang Pekerja Sosial profesional bisa mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya dalam setting praktek pekerjaan sosial. Penerapan suatu teori atau pengetahuan membutuhkan keterampilan, sehingga setiap profesi memerlukan keterampilan. Keterampilan merupakan komponen penting di dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, sebab keterampilan pada prinsipnya merupakan alat untuk memadukan antara pengetahuan dan nilai-nilai pekerjaan sosial.

Keterampilan pekerjaan sosial adalah kemampuan para Pekerja Sosial untuk menetapkan suatu misi, di dalam kaitannya dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses intervensi sosial, yang perubahannya didasarkan kepada nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial. Keterampilan pekerja sosial diekspresikan dalam salah satu atau lebih metoda pekerjaan sosial generalis yaitu penggunaan rasa tanggung jawab, kesadaran, kezhlian, dan disiplin diri dalam berelasi dengan para PPKS.

Kompetensi praktek pekerjaan sosial terlihat pada penguasaan keterampilan untuk menggunakan metoda dan teknik pekerjaan sosial. Keterampilan pekerjaan sosial pada dasarnya merupakan kemampuan memahami peranan Pekerja Sosial dan kemampuan untuk membantu klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, agar mau berpartisipasi di dalam proses pemecahan masalah maupun kemampuan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial untuk dapat melaksanakan praktek pekerjaan sosial dengan baik menurut Zastrow (1983) adalah sebagai berikut: Observasi situasi dan kegiatan, Pengumpulan data, Analisis data, Identifikasi permasalahan sosial, Mendengarkan, Berkomunikasi, dengan efektif, Wawancara/interview, Memberikan informasi, Berinteraksi dengan orang lain, Penjelasan mengenai perasaan dan sikap, Penjelasan mengenai implikasi yang dipilih, Dorongan dan bimbingan, Motivasi-motivasi lain, Mengajarkan hal-hal yang lain, Mengidentifikasi tujuan, Memilih strategi intervensi yang tepat, memonitor pemerataan penyebaran pelayanan, mengadakan kontrak, melakukan advokasi, berhubungan dengan kolega/teman sejawat, mencatat kasus, dan mengasesmen kegiatan-kegiatan intervensi

Selain itu dalam konteks pengembangan masyarakat, keterampilan dasar (*Body of Skill*) yang harus dimiliki Pekerja Sosial menurut Widhiowati,dkk (2010) adalah: keterampilan dalam melakukan komunikasi personal, memfasilitasi kelompok & pertemuan, melakukan pendidikan masyarakat, menyediakan sumber bagi struktur dan proses-proses masyarakat, membuat tulisan, memberi motivasi, meningkatkan antusiasme dan mengaktifkan masyarakat, mengatasi konflik-konflik serta melakukan negosiasi dan mediasi, memainkan peran perwakilan/representasi advokasi, melakukan presentasi publik, bekerja dengan media massa, manajemen dan organisasi, dan melakukan penelitian

Mengacu pada kompetensi pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, nilai dan keterampilan, maka dapat dilihat bahwa profesi pekerjaan sosial tidak sama dengan profesi-profesi lainnya yang banyak memberikan sumber dalam proses pertolongannya. Kompetensi pekerjaan sosial memberikan suatu kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka nilai (*body of values*) dan seprangkat keterampilan (*body of*

skills) dari pendekatan atau intervensi pertolongan terbaik untuk diseleksi dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

Menurut Khinduka dan Coughin (1978), secara garis besar, posisi peran yang dapat disandang Pekerja Sosial dalam skala wilayah tersebut, antara lain:

- a. Perencana social (*social planner*)
- b. Peneliti (*Researcher*)
- c. Pendidik (*Educator*)
- d. Penyembuh (*Therapist*).

Selanjutnya, karena posisi-perannya yang meliputi skala mikro maupun makro dalam perubahan (penataan) kehidupan sosial di dalam masyarakat, maka praktik pekerjaan sosial harus dilandasi oleh nilai-nilai sosial-budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, para Pekerja Sosial sebagai penyandang keahlian pekerjaan sosial harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memahami, menguasai, dan menghayati serta menjadi figur pemegang nilai-nilai sosio-kultural dan filsafat masyarakat.
- b. Menguasai sebanyak dan sebaik mungkin berbagai perspektif teoritis tentang manusia, khususnya sebagai makhluk sosial, lebih khusus lagi perilaku interaktif manusia beserta wadah kelembagaannya dalam keanekaragaman bentuk beserta perubahan-perubahannya.
- c. Menguasai dan secara kreatif menciptakan berbagai metode pelaksanaan tugas profesionalnya.
- d. Memiliki mental wirausaha, yang mencakup:
 - 1) Kepekaan terhadap perkembangan masyarakat beserta kebutuhan-kebutuhan sosial yang menjadi konsekuensi perkembangan tersebut.
 - 2) Keberanian untuk memprakarsai tindakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan sosial institusional.

- 3) Kemandirian dalam berpikir dan bersikap serta kemampuan merumuskan dan mengungkapkan pandangan dan mewujudkannya dalam tindakan nyata.
- 4) Kreativitas dalam upaya untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide baru dalam pelaksanaan tugas profesinya.

Istilah Pekerja Sosial ditujukan kepada lulusan-lulusan sekolah-sekolah Pekerjaan Sosial yang diperkerjakan pada lembaga kesejahteraan sosial. Seorang Pekerja Sosial adalah seorang agen atau pelaksana perubahan (*change agent*). Sebagai seorang pelaksana perubahan Pekerja Sosial dipersyaratkan untuk memiliki keterampilan-keterampilan dalam bekerja dengan individu-individu, kelompok-kelompok dan keluarga-keluarga serta melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Charles Zastrow, 1981).

Menurut *National Association of Social Workers (NASW)*, Pekerja Sosial dapat dikelompokkan menjadi empat (4) golongan, yaitu:

a. Pekerja Sosial Tingkat Profesional Dasar (*Basic Professional*)

Tingkatan ini mensyaratkan kualifikasi pendidikan dari tingkat diploma/*bachelor* dari keilmuan Pekerjaan Sosial, yang mendasarkan pada konsep-konsep, teori dan pengetahuan tentang manusia dalam interaksi sosialnya serta secara inisiatif melatih Pekerja Sosial agar dapat menggunakan dirinya sendiri (*use of self*) dalam relasinya dengan klien.

b. Pekerja Sosial Tingkat Spesialis

Pada tingkat ini kualifikasi pendidikan Pekerja Sosial yang dipersyaratkan adalah Tingkat Magister atau Master di bidang keilmuan Pekerjaan Sosial. Pada tingkatan ini, Pekerja Sosial dituntut mampu menguasai dan dapat mendemonstrasikan sekurang-kurangnya satu teknik terapi. Kemampuan tersebut harus pula didukung oleh pengetahuan tentang kepribadian manusia, dan kemampuan untuk

menggunakan diri sendiri dalam kaitannya dengan relasi pertolongan terhadap individu dan kelompok. Selain itu, Master Pekerjaan Sosial dituntut pula untuk menguasai pengetahuan tentang penelitian, administrasi, metode perencanaan, dan masalah sosial.

c. Pekerja Sosial Tingkat Independen (Mandiri)

Pekerja Sosial Independen adalah Pekerja Sosial setingkat Master yang telah memiliki pengalaman praktik sekurang-kurangnya selama dua tahun di bawah *supervise professional*. Tingkatan ini membutuhkan pencapaian praktik yang didasarkan pada pelatihan khusus, selain dapat mengembangkan dan mendemonstrasikan keterampilannya di bawah *supervise* yang professional. Persyaratan tersebut berlaku baik untuk Pekerja Sosial yang bekerja secara independen maupun bagi mereka yang bekerja pada organisasi tertentu.

d. Pekerja Sosial Tingkat Ahli (*Advance*)

Pada tingkat ini, kualifikasi pendidikan Pekerja Sosial yang dipersyaratkan adalah tingkat Doktor/Ph.D. Pada tingkatan ini, penerapan keilmuan Pekerjaan Sosial lebih bersifat "*advance*" karena praktik Pekerjaan Sosial menuntut tanggung jawab organisasi dan sosial yang sangat tinggi dalam rangka pengembangan profesi, analisis, penelitian, serta implementasi kebijakan. (Mach, M.W., Quam, J.K., and Seidl, F.W., 1986)

Sedangkan Morales & Sheafor mengklasifikasikan profesi pekerjaan sosial ke dalam dua level utama, yaitu:

a. Level Praprofesional

1) Bantuan Pelayanan Sosial

Penilaian akan kematangan individu, pengalaman hidup, motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan dengan tugas dan fungsi tertentu.

2) Teknisi Pelayanan Sosial

Telah mengikuti program kependidikan selama dua tahun dalam satu atau pelayanan sosial lainnya, biasanya keahlian seni tertentu.

b. Level Profesional

1) Pekerja Sosial

Tingkat sarjana dengan akreditasi program pekerjaan sosial.

2) Lulusan Pekerja Sosial

Lulusan dari program Master Pekerjaan Sosial yang terakreditasi.

3) Pekerja Sosial Bersertifikat

a) Sertifikasi dengan Akademi Pekerja Sosial sehingga mampu secara otonomi, praktik mandiri, atau

b) Lisensi menurut peraturan pemerintah

4) *Social Worker Fellow*

Pekerja Sosial yang memenuhi program doctor atau praktik substansial dalam bidang atau spesialisasi menurut Asosiasi Sertifikasi Pekerja Sosial.

B. Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan wujud aktivitas Pekerja Sosial dalam praktek profesionalnya. Jika masalah sosial dikategorikan menjadi masalah disorganisasi sosial dan penyimpangan perilaku (Merton & Nisbet, 1976), maka bidang-bidang pelayanan sosial harus pula mencakup pelayanan klinis sampai ke penataan sistem masyarakat itu sendiri. Merton dan Nisbet merinci masalah-masalah sosial, sebagai berikut:

1. Perilaku Menyimpang (*Deviant Behavior*):

a. Tindakan Kejahatan dan Kenakalan Remaja (*Crime and Juvenile delinquency*)

b. Gangguan-gangguan mental (*Mental Disorders*)

c. Penggunaan obat-obat terlarang (*Drugs Use*)

d. Kecanduan alkohol dan perhabukan (*Alcoholism and Problem Drinking*)

e. Perilaku seksual (*Sexual Behavior*)

2. Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization*)
 - a. Krisis Kependudukan Dunia (*The World's Population Crisis*)
 - b. Kesetaraan dan Ketidaksetaraan (*Equality and Inequality*)
 - c. Lansia (*Age and Aging*)
 - d. Peranan-peranan Seksual (*Sex Roles*)
 - e. Ras dan antar hubungan kelompok didalam masyarakat (*Race and Intergroup Relations*)
 - f. Disorganisasi Keluarga (*Family Disorganization*)
 - g. Disorganisasi Komunitas dan Masalah-masalah Perkotaan (*Community Disorganization and Urban Problems*)
 - h. Dunia Pekerjaan (*The World of Work*)
 - i. Kemiskinan dan Proletariat (*Poverty and Proletariat*)
 - j. Kekerasan Kolektif (*Collective Violence*).

Rincian bidang-bidang pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Johnson (1986), sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan pendapatan (*Public Welfare and Income Maintenance*)
2. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di rumah (*Services to Families and Children in the Home*)
3. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di luar rumah (*Services to Families and Children Outside the Home*)
4. Praktik Pekerjaan Sosial di Sekolah (*Social Work in the Schools*)
5. Pelayanan sosial di bidang kesehatan (*The Health Field and Sosial Work*)
6. Pekerjaan sosial di bidang kesehatan mental (*Mental Health and Sosial Work*)
7. Pelayanan sosial di bidang tindakan pelecehan/kesewenangan (*Social Services and Substance Abuse*)
8. Peradilan kejahatan dan kenakalan (*Criminal and Juvenile Justice*)
9. Pelayanan sosial bagi lansia (*Social Work and Older Persons*)

10. Pelayanan sosial di tempat bekerja (*Social Work in the Workplace*)
11. Bidang-bidang praktek Pekerjaan Sosial non tradisional (*non-traditional Settings of Social Work Practice*).

Menurut Ensiklopedia Pekerjaan Sosial, terdapat 31 bidang Praktik Pekerjaan Sosial yang secara umum menjadi bidang garapan lembaga kesejahteraan sosial pada berbagai Negara. Bidang-bidang tersebut adalah:

1. *Addiction*. Meliputi ketergantungan pada alkohol dan ketergantungan pada obat (narkotika)
2. *Child Welfare*. Meliputi *adoption, foster care, day care of children, pre school programs residential treatment*
3. *Community Welfare Council*
4. *Crime and Delinquence*. Meliputi *institution, parole and probation*
5. *Disability and Physical Handicap*. Meliputi pelayanan bagi eks penderita penyakit kronis, orang-orang yang mengalami gangguan bicara, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan pemberian pelayanan rehabilitasi vocational.
6. Pendidikan Pekerjaan Sosial
7. Perencanaan sosial dan lingkungan
8. Penduduk dan keluarga berencana
9. Pelayanan-pelayanan pada keluarga
10. *Halfway House*
11. Pelayanan kesehatan. Meliputi pelayanan kesehatan mental masyarakat, konseling genetika, perencanaan rumah sakit dan kesehatan, program kesehatan ibu dan anak-anak, serta program kesehatan masyarakat.
12. Pelayanan *home maker* dan bantuan kesehatan keluarga (*home health aids services*)
13. Perumahan (*housing*). Meliputi program bantuan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah
14. Pelayanan kesehatan mental dan pelayanan bagi orang yang mengalami retardasi mental.

15. Pelayanan bagi petani migran
16. Pelayanan migrasi dan *resettlement*
17. Pelayanan perlindungan
18. *Public assistance and supplemental security income*
19. Pelayanan rekreasi dalam perencanaan lingkungan
20. Penelitian Pekerjaan Sosial
21. Pekerjaan sosial di pedesaan
22. Pekerjaan sosial di sekolah
23. Pemberian pelayanan kepada kelompok agar dapat menolong dirinya sendiri (*self help groups*)
24. Pusat-pusat masyarakat atau penduduk (*Community and Settlement Centers*)
25. Kebijakan sosial
26. *Unwed Parrents* (orangtua yang punya anak tanpa nikah)
27. Pelayanan terhadap para veteran
28. Mengelola pelayanan-pelayanan//bantuan sukarela
29. Lembaga-lembaga pelayanan bagi pemuda
30. Pekerjaan sosial dalam kemiliteran
31. Pelayanan-pelayanan ketetanggaan (*neighborhood*)

Setting praktek Pekerjaan Sosial meliputi bidang yang sangat luas dan sangat bervariasi, baik dalam ukurannya maupun kedalamannya. Yang bisa menjadi bidang garapan Pekerja Sosial meliputi semua masyarakat. Pekerja Sosial bisa bekerja di setiap tempat apabila dibutuhkan. Secara umum Pekerja Sosial dapat melakukan kegiatan praktiknya dalam praktik-praktik perorangan/pribadi secara swasta, atau bekerja pada lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga tempat Pekerja Sosial bekerja bisa meliputi: rumah sakit, sekolah, organisasi pelayanan masyarakat, militer atau lembaga-lembaga lain yang membutuhkan tenaga Pekerja Sosial.

Dengan banyak dan bervariasinya setting praktik Pekerjaan Sosial, maka dalam membuat ketentuan-ketentuan praktik Pekerjaan Sosial tidak hanya didasarkan pada jenis sistem klien yang dihadapi dan metode yang digunakan saja, melainkan juga didasarkan pada setting praktik Pekerjaan Sosial itu sendiri. Oleh karena itulah maka kemudian kita mengenal berbagai jenis Pekerjaan Sosial, seperti Pekerjaan Sosial Medis, Pekerjaan Sosial Koreksional, Pekerjaan Sosial Sekolah, Pekerjaan Sosial Kelompok, Pekerjaan Sosial Psikiatrik, dan lain sebagainya.

Secara umum setting praktik Pekerjaan Sosial dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: setting primer dan setting sekunder. Penggolongan ini didasarkan pada bidang garapan pokok lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Penggolongan setting seperti ini sering mengakibatkan kebingungan, karena penggolongan pada setiap negara akan berbeda-beda, sejalan dengan perbedaan bidang garapan pokok lembaga kesejahteraan di masing-masing negara.

Pekerja Sosial dalam berbagai bidang praktik ini dapat berperan dalam berbagai kategori peranan. Menurut Armando Morales terdapat tiga (3) kategori peranan Pekerjaan Sosial dalam berbagai bidang, yaitu:

1. Sebagai *Primary Disciplines*:

1. Pelayanan kesejahteraan anak

- 1) Adopsi dan pelayanan terhadap orangtua tanpa nikah. Pelayanan adopsi merupakan pelayanan kesejahteraan anak yang bersifat permanen. Anak yang diberi pelayanan tidak mungkin lagi dapat berhubungan dengan keluarga permanennya (keluarga asli).
- 2) *Foster Care*. Pelayanan ini tidak bersifat permanen seperti pada adopsi. Anak yang diberi pelayanan masih dimungkinkan untuk berhubungan dengan keluarga aslinya.
- 3) *Residential Care*. Pelayanan *residential* adalah pelayanan yang diberikan pada anak yang menunjukkan penyimpangan perilaku

dan memerlukan penanganan khusus yang bersifat intensif. Pelayanan diberikan pada suatu tempat tertentu secara khusus dalam jangka waktu tertentu pula, sampai anak yang diberi pelayanan dinyatakan sembuh secara sosial. Ada dua macam pelayanan *residential*, yaitu:

- a) *Group Home*
- b) *Residential Treatment Centers*

- 4) *Support in Own Home*. Pelayanan diberikan kepada anak yang tetap tinggal bersama keluarganya sendiri, berupa konseling atau menghubungkan klien dengan sistem sumber yang ada di luar keluarganya.
- 5) Pelayanan Protektif. Pelayanan protektif diberikan kepada anak yang diterlantarkan atau yang diperlakukan sewenang-wenang. Pelayanan ini diberikan kepada anak tanpa melanggar hak-hak orangtua.

b. Pelayanan bagi keluarga (*Family Services*)

Pelayanan ini adalah usaha untuk memahami, menginterpretasikan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan keluarga yang mengalami perubahan. Pelayanan keluarga ini meliputi:

1) Pelayanan konseling bagi keluarga (*Family Counselling*)

Pelayanan ini bertujuan untuk membantu penyesuaian keluarga terhadap peranan-peranan dan dalam menghadapi berbagai masalah. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan *Family Case Work* yang diarahkan pada individu-individu anggota keluarga itu sendiri.
- b) Pendekatan *Family Group Work*, yaitu pelayanan yang diarahkan pada relasi-relasi keluarga secara keseluruhan.

2) *Family life education* (Pendidikan Kehidupan Keluarga)

Dalam jenis pelayanan ini, keluarga yang mempunyai masalah dan tekanan-tekanan diberi kemampuan untuk mengantisipasi

berbagai masalah dan untuk mencegah kehancuran keluarga. Dalam pelayanan ini juga keluarga diperkenalkan dengan berbagai krisis yang mungkin menimpa sebuah keluarga, sehingga keluarga tersebut mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang suatu waktu dapat menimpa keluarganya.

- 3) Keluarga Berencana. Pelayanan ini diberikan kepada keluarga-keluarga agar dapat mengendalikan dan merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, sehingga kesejahteraan keluarga dapat lebih terjamin.

c. *Income Maintenance*

Pelayanan ini berupa pemeliharaan terhadap standar minimum penghasilan. Terdapat dua macam *Income Maintenance* yang banyak dikenal, yaitu:

- 1) *Public Assistance* (Asistensi Sosial)
- 2) Asuransi Sosial, dan program-program lainnya.

d. Pekerjaan Sosial sebagai *Equal Partner*:

Sebagai *Equal Partner Disciplines*, Pekerjaan Sosial meliputi pelayanan terhadap orang-orang lanjut usia, yaitu:

- 1) Bantuan kepada lanjut usia yang tinggal di rumahnya. Pelayanan ini diberikan kepada para lanjut usia selama mereka menganggap bahwa tinggal di rumah sendiri merupakan pengalaman yang memuaskan. Pekerja Sosial memberikan bantuan dengan menghubungkan klien pada berbagai program masyarakat.
- 2) Pemberian bantuan berupa pemberian fasilitas pemeliharaan dalam jangka waktu lama. Pekerja Sosial bisa melakukan bantuan berupa memilih fasilitas yang dibutuhkan, atau memindahkan klien ke tempat lain yang dianggap lebih baik, atau bisa juga Pekerja Sosial menjadi anggota dari fasilitas pelayanan itu sendiri.

2. Pekerja Sosial sebagai Disiplin Sekunder

Dalam kategori ini Pekerja Sosial tidak menduduki posisi utama. Peranan Pekerja Sosial dalam memecahkan masalah hanya bersifat memberikan bantuan terhadap disiplin lain yang mempunyai posisi utama. Beberapa setting dimana Pekerja Sosial mempunyai peranan sebagai disiplin sekunder adalah:

a. Pekerjaan Sosial dalam pelayanan koreksional

Dalam setting ini, Pekerjaan Sosial bersifat membantu terhadap disiplin ilmu hukum dan usaha-usaha hukum.

b. Pekerjaan Sosial dalam industri

Pekerjaan Sosial memberikan sokongan terhadap usah-usaha industrialisasi agar dapat mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melupakan kemanusiawian relasi-relasi antar orang yang terlibat di dalam industri tersebut. Usaha ini bisa diarahkan pada manajer perusahaan dengan memberikan berbagai bantuan dan dukungan yang diperlukan, dan bisa juga diarahkan kepada penyediaan sumber-sumber dan emosional yang dibutuhkan para pekerja.

c. Pekerjaan Sosial dalam pemeliharaan medis dan kesehatan

d. Pekerjaan Sosial di sekolah.

Secara garis besar setting utama tempat berkiprahnya para Pekerja Sosial digambarkan oleh Suharto (2007) meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Keluarga dan pelayanan anak: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga
2. Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketetangaan, pemeliharaan lingkungan hidup, penguatan modal sosial dan ekonomi kecil,

3. Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA.
4. Perlindungan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, *social fund raising*, jaring pengaman sosial
5. Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan, manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
6. Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pengajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan
7. Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stress dan *burn out*, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

C. Strategi Pelayanan Sosial

Terdapat beberapa strategi pelayanan sosial yang dapat dilakukan, antara lain:

1. *Child/Individual Based Services*

Pelayanan yang menempatkan individu sebagai basis penerima pelayanan: misalnya konseling.

2. *Institutional Based Services*

Dalam pelayanan ini, individu yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial; misalnya dalam hal pendidikan dan pelatihan.

3. *Family Based Services*.

Dalam pelayanan ini, keluarga dijadikan sebagai sasaran dan media utama dalam pemberian pelayanan; dalam hal ini kegiatan diarahkan

pada pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial dalam memecahkan masalahnya.

4. *Community Based Services*

Pelayanan ini menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani masalah. Dalam hal ini, peran Pekerja Sosial adalah bersama masyarakat merancang dan melaksanakan program *Community Development*, bimbingan dan penyuluhan, ataupun melakukan kampanye sosial.

5. *Location Based Services*

Dalam strategi pelayanan ini, pelayanan diberikan di lokasi individu yang mengalami masalah.

6. *Half-Way House Services*

Contohnya pelayanan yang semi panti

7. *State Based Services*

Pelayanan ini bersifat makro, tidak langsung (*macro-indirect services*).

D. Organisasi (Badan) Pelayanan Sosial

Ulberth Silalahi dalam Budi Wibawa dkk (2010) membagi pengertian organisasi ke dalam dua (2) sudut pandang, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah, yakni tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya relatif statis.
2. Organisasi sebagai proses, yakni interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi dan sifatnya dinamis.

Organisasi sosial atau sering diartikan sebagai organisasi pelayanan sosial merupakan organisasi formal yang fungsi utamanya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi sosial dalam pengertian sosiologi atau sama dengan organisasi pelayanan sosial (*social services organization*).

1. Sosiologis:

- a. Jaringan hubungan antar manusia
- b. Wadah aktivitas manusia yang bergerak di bidang sosial, dalam perbandingan dengan organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi militer, dan seterusnya.

2. Organisasi Pelayanan Sosial:

- a. Melakukan pelayanan langsung kepada klien
- b. "Bahan mentah" nya adalah klien itu sendiri
- c. Proses produksi intinya adalah hubungan antara pelaksana dan penerima pelayanan
- d. Tujuannya bukan menghasilkan keuntungan kepada 'stakeholders' melainkan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dilayani.
- e. Hampir semua Organisasi Pelayanan Sosial merupakan lembaga non-profit yang didanai baik oleh pemerintah maupun oleh donatur swasta; walaupun dalam perkembangannya sudah mulai banyak praktik privat seperti praktik dokter dan pengacara.

Karakteristik dari organisasi pelayanan sosial atau manusia yang dikemukakan oleh Hasenfeld (1983) yang patut diketahui oleh para Pekerja Sosial adalah sebagai berikut:

1. Fakta bahwa material dasarnya (*raw material*) adalah terdiri dari orang-orang dengan sejumlah nilai-nilai moral yang mempengaruhi aktivitas organisasi sosial.
2. Tujuan dari organisasi pelayanan sosial adalah samar-samar (*vague*), berarti mendua (*ambiguous*) dan bermasalah (*problematic*)
3. Morel ambigu yang mengitari pelayanan sosial juga menunjukkan organisasi pelayanan sosial bergerak dalam lingkungan bergolak, artinya lingkungan tersebut terdiri dari banyak kepentingan kelompok yang berbeda-beda.

4. Organisasi pelayanan manusia harus beroperasi dengan teknologi yang tidak menentukan dengan tidak menyediakan pengetahuan yang lengkap mengenai bagaimana mencari hasil yang diharapkan.
5. Aktivitas utama di dalam organisasi pelayanan sosial terdiri dari hubungan antara staf dan klien. Tidak menutup kemungkinan para staf dalam organisasi sosial lebih banyak terdiri dari para relawan yang harus berhubungan dengan kliennya.
6. Karena keutamaan hubungan staf dan klien, maka posisi dan peran staf lini (staf profesional) secara khusus adalah penting dalam organisasi pelayanan manusia.
7. Organisasi pelayanan sosial miskin pengukuran mengenai efektivitas yang *reliable* dan *valid*, dan mungkin lebih mampu bertahan terhadap perubahan dan inovasi.

Beberapa karakteristik yang seharusnya melekat pada pelayanan sosial dewasa ini yaitu:

1. Didasarkan pada nilai sosio-budaya dan agama masyarakat
2. Adaptif terhadap perubahan masyarakat
3. Berfungsi memperkuat, mendukung, dan/atau menggantikan fungsi dan struktur lembaga sosial tradisional
4. Ditekankan pada upaya pencegahan (*preventif*) timbulnya masalah dan pengembangan (*developmental*) kemampuan orang untuk mengatasi masalahnya sendiri, daripada kepada upaya penyembuhan (kuratif, represif, rehabilitatif)
5. *Voluntary*, artinya dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh masyarakat tanpa mengandalkan lembaga-lembaga pemerintah (*public social services*).

E. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro, UKS ini pada intinya merujuk pada apa yang di Indonesia dikenai dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Pembangunan kesejahteraan sosial bersifat komprehensif, artinya pelayanan yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu ataupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial, dengan prioritas utama adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran pembangunan

kesejahteraan sosial biasa dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, pasangan yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial (Suharto, 2007).

PMKS yaitu manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya baik individu, keluarga kelompok maupun masyarakat. Kondisi sosial ekonomi dan atau kondisi sosial mental mereka tidak memadai sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. PMKS memiliki hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung..

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara jelas menetapkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki tujuh (7) kriteria masalah sosial yaitu: kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari ke tujuh kelompok tersebut ada lima (5) masalah sosial yang kritis dan perlu perhatian, yakni: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan korban bencana. Dari lima masalah sosial kritis itu, masalah kemiskinan dan keterlantaran paling pelik dihadapi pemerintah, karena populasinya banyak, tetapi sumber daya untuk membantu mereka sangat terbatas. Secara umum masalah kesejahteraan sosial terbagi dalam dua golongan, yaitu :

kesejahteraan sosial biasa dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, pasangan yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial (Suharto, 2007).

PMKS yaitu manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya baik individu, keluarga kelompok maupun masyarakat. Kondisi sosial ekonomi dan atau kondisi sosial mental mereka tidak memadai sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. PMKS memiliki hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara jelas menetapkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki tujuh (7) kriteria masalah sosial yaitu: kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari ke tujuh kelompok tersebut ada lima (5) masalah sosial yang kritis dan perlu perhatian, yakni: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan korban bencana. Dari lima masalah sosial kritis itu, masalah kemiskinan dan keterlantaran paling pelik dihadapi pemerintah, karena populasinya banyak, tetapi sumber daya untuk membantu mereka sangat terbatas. Secara umum masalah kesejahteraan sosial terbagi dalam dua golongan, yaitu :

1. Masalah kesejahteraan sosial konvensional, yaitu masalah yang sudah ada sejak dahulu dimana keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan dan teknologi, seperti :

a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marginal.

b. Wanita rawan sosial ekonomi, yaitu wanita dewasa yang belum menikah/janda yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

c. Keluarga berumah tidak layak huni, adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya kumuh serta tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

d. Keterlantaran, antara lain meliputi :

1) Balita terlantar, yaitu anak usia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga berakibat terganggunya tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun emosional.

2) Anak terlantar, yaitu anak yang karena suatu sebab orangtuanya malalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.

3) Lanjut usia terlantar, yaitu mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas yang karena sebab tertentu berada dalam kondisi tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya baik secara fisik, mental maupun sosial.

- e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT), yaitu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografis terpencil, terisolasi dan secara sosial budaya terasing dan atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.
- f. Kecacatan, dikenal sebagai penyandang cacat, yaitu seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau menghambat dirinya untuk melakukan suatu kegiatan.
- g. Ketunaan Sosial, yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain :
- (1) Gelandangan dan Pengemis, sebagai akibat dari semakin sulitnya kehidupan serta semakin berkurangnya lahan garapan serta semakin kuatnya tekanan ekonomi akhirnya menyebabkan penduduk desa pindah ke perkotaan, namun karena pendidikan dan keterampilan yang dimiliki terbatas terpaksa mereka mengemis dan menggelandang di perkotaan.
 - (2) Tuna susila, yaitu wanita/pria yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan mendapat imbalan uang atau barang.
 - (3) Bekas Narapidana, yaitu seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat untuk menjalankan kembali fungsi sosialnya.
 - (4) Anak/Remaja nakal, masalah kenakalan anak/remaja semakin menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas serta intensitasnya dan tingkat persebarannya. Hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi modernisasi serta derasnya arus informasi serta dampak terjadinya kritis.
- h. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan pada Bab III, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh yayasan swasta dilandasi oleh filosofi keagamaan dan kedermawanan, dengan jenis pelayanan berupa pengasuhan dan pendidikan formal. Pengelolaannya dilakukan oleh tenaga pelaksana yang jumlahnya sangat terbatas dan belum melibatkan Pekerja Sosial.
2. Jenis layanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang selain pengasuhan dan pendidikan formal, memerlukan jenis layanan bimbingan dan konseling, pembinaan bakat, dan pembinaan spiritual.
3. Belum ada Pekerja Sosial yang bertugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang.
4. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang sewaktu-waktu memerlukan tenaga Pekerja Sosial, sehingga tidak perlu menetap di dalam panti. Jumlah yang diperlukan sekitar 1 berbanding 8 dengan jumlah klien yang ditangani.
5. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang belum pernah merekrut Pekerja Sosial, sehingga belum mengalami hambatan dalam rekrutmen Pekerja Sosial.
6. Kebijakan penanganan masalah sosial di Kabupaten Sumedang terdiri atas kebijakan jangka panjang, yakni meningkatkan ketahanan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan kebijakan jangka pendek, yakni mengakses program-program penanganan PMKS tingkat nasional di kementerian dan lembaga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mendorong profesionalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada *setting* anak terlantar di Kabupaten Sumedang dengan cara memastikan adanya Pekerja Sosial yang bertugas di setiap lembaga pelayanan sosial.
2. Diperlukan kajian mendalam untuk memastikan kebutuhan Pekerja Sosial, baik jumlah maupun bidang keahlian yang diperlukan di berbagai *setting* pelayanan sosial di Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: RIMBOOKS PT. Wahana Semesta Indonesia
- , (2001). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press
- Hakim, Budi Rahman (2010). *Rethinking Social Work Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uversitas Indonesia.
- Ife, James Williams, (2010). *Community Development: Community Based Alternatives in an age of Globalisation*. Logman, Australia: Logman.
- Sukoco, Dwi Heru (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uversitas Indonesia.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : CV Afabeta
- , (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : CV Afabeta.
- , (2010). *Membangun Masyarakat memberdayakan Masyarakat*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Widhiowati, Didiet dan Herawati, Guntur T Aritonang, Diana H (2010). *Kompetensi Pekerjaan Sosial dalam pengembangan Masyarakat*. Bandung: Seminar Internasional Social Work Update
- Zastrow, Charles H (1999). *The Practice of Social Work*, Pacific Grove: Brooks/Cole

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Permensos RI No.8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Website:

- <http://www.depsos.go.id>
- <http://www.bnsp-indonesia.org>
- <http://www4.shoutmix.com>
- <http://disos.jabarprov.go.id/gisprn.ks/rekap/2012/rekap-data-pmks.htm>
- <http://tksk-jumedang.blogspot.co.id/>